SKRIPSI

TATA KELOLA RISIKO MENGANA GEMPA BUMI DI SPBU PRATAMA SULAWESI BARAT

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MUH. ARFAN QURNIA KAYRAUP

[illegible]

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022

TATA KELOLA HIBAH RINCIAN APBDES DESA DI DINAS PRODUSEN MALAKUSU BARAT

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Nasrum bin Rahman (0)
Mak Ar bin Syamsuddin Rauf
Nomor Induk Mahasiswa: [illegible]

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022

DAFTAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : [illegible]

[illegible]

Nama Mahasiswa : [illegible]

Nomor Stambuk : [illegible]

Program Studi : [illegible]

Menyetujui

Pembimbing I

[illegible]

Pembimbing II

[illegible]

Mengetahui

Dekan

[illegible]

Ketua Program Studi

[illegible]

[illegible]

SURAT TUGAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : [illegible]

Nomor Induk : [illegible]

Program Studi : [illegible]

[illegible]

[illegible] 13 Januari 2022

[illegible]

[illegible]

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur yang paling [illegible] atas [illegible] yang [illegible] **Allah Swt.** yang [illegible] [illegible] [illegible]

Syarat khusus penulis menyampaikan ucapan kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dari penulis ayahanda Ardhanya Sarie serta ibunda [illegible] **yang selalu memberikan kasih sayang dan kasih sayang yang mengalir** pada setiap doa dan harapan yang bertiada hingga akhirnya.

Selain itu penulis juga mengucapkan ucapan kasih kepada bapak/ibu:

1. Dapat. Rasdi Awang, S.Sos.,M.Si. dan Ma.Dian Luxing, M.Ak.,M.I selaku pembimbing I dan II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dan [illegible]
2. Prof. Dr. [illegible] selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. [illegible] selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr. [illegible] selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Dapat. Abu Ubaidillah, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Dr. Ir. Muhammad [illegible] selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan memberi pesan-pesan selama mengikuti proses perkuliahan.
5. Saudara-saudaraku yang tanda jasa dosen UNM-Parepare Sosiologi dan Komunikasi serta Kesekretariatan Komunikasi Institut dan Komunitas Ingsas, pengalaman, ilmu, kesperimen dan dukun tangan, mencerminkan penelitian.
6. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan proposal yang telah memberikan dorongan dan motivasi baik moril dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kesadaran bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Parepare, 20 Januari 2021

Penulis,

ABSTRAK

SUHARPAN (QURNOVAN RAUF, 102). Tata Kelola Rapat Komisi Gunga Rumi Di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. (Dibimbing oleh Rizal Abdul Aziz dan Lindawaty Lantang)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kata kunci : **Tata Kelola, Gunga Rumi, DPRD Provinsi Sulawesi Barat.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR xi
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Tari Cakha Maceno 9
C. Pelanggaran Norma Kesusilaan 9
D. Tari dan Aplikasi Nilai-nilai 15
E. Kerangka Teori 20
F. Kerangka Berpikir 30
G. Hubungan Antar Variabel 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 32

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
B. Jenis dan Tipe Penelitian 32
C. Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Instrumen Penelitian 34
F. Teknik Analisis Data 35
G. Teknik Keabsahan Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **38**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38

B. Deskripsi Operasional Dari Jaja Kotta Dalam Menggunakan Mesin Gasoline (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan 44

C. Hasil Jaja Kotta Dalam Pandangan Fiqh Muamalah 50

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Jaja Kotta Dalam Menurut Sudut Pandang Hukum di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 56

BAB V PENUTUP **72**

A. Simpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA **75**

LAMPIRAN **78**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **81**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Penyebaran Lokasi Studi 9
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 23
Tabel 4.1 Gambaran Sekolah di Bone 29
Tabel 4.2 Daftar Pejabat dan Pelaksana Tugas Gubernur 31
Tabel 4.3 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Barat 34
Gambar 2.1 Kerangka Pikir 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Asia, lempeng Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan timur Indonesia terdapat lebih intensif pergerakan lempeng tektonik Eurasia-Australia, yang [illegible] dan Maluku, yang [illegible] [illegible] dan [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]".

B. Rumusan Masalah

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fata kerja wanita bekerja pada di UPKB Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan dan produktivitas wanita bekerja pada di UPKB Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta sebagai sumber acuan bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian lanjut dengan tema yang sama.
2. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan untuk pemerintah di Kantor Gubernur Sulawesi Barat dalam mengembangkan kinerja pegawai wanita.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dipublikasi (internet dan offline) dalam [illegible] 5 tahun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	[illegible] (2017)	[illegible] Pendekatan [illegible] Wilayah [illegible] di Kecamatan Sukolilo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa [illegible]
2	[illegible] (2019)	[illegible] Pengelolaan [illegible] dan [illegible]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi [illegible]
3	[illegible] (2018)	[illegible] Pengelolaan [illegible]	Hasil penelitian menunjukkan bahwa [illegible]
4	Nabilah Fauziah (2019)	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah [illegible] dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Lubuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran [illegible]

No.	Nama Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rinka (2018)	Tata Kelola Penanggulangan Banjir Sungai Lengan di Kecamatan Rimba Kabupaten Tarakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penanggulangan bencana banjir [illegible] Sungai Lengan [illegible] [illegible] [illegible]

yang akan dibuat masyarakat dan kondisi ini cenderung [illegible] dimana dan dipertanyakan bahwasanya dalam transparansi pemanfaatan bahasa yang dikatakan pemerintah kerja dan masyarakatnya tetap tidak berdaya maka keunggulan dalam bahasa politik kita menjadi [illegible] bahasa politik atau bahasa politik dan [illegible] (Kusumo, 2013).

Di negara-negara [illegible] pemanfaatan bahasa ini [illegible] yang lebih cenderung dari [illegible] bahasa [illegible] yang [illegible] dan pemanfaatan [illegible] yang [illegible] di Indonesia [illegible] pada [illegible] bahasa [illegible] yang [illegible] dan [illegible] pada [illegible] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang [illegible] Undang-Undang [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] pemanfaatan [illegible] [illegible] [illegible]

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sering dengan alasan kesiapan [illegible] pemerintahan yang lebih *good governance* [illegible] pemerintahan [illegible] ekonomi, efisiensi, keadilan, [illegible] prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, [illegible], [illegible] [illegible] dari kesatuan negara (Syafrudin, 2014).

C. Manajemen Kelas Bermutu

[illegible] Nasional [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dengan demikian bentuk pengelolaan [illegible] [illegible] sebagai berikut :

1. Pemisah Kotor (**Bid document**)
2. Pengelolaan Kotor (**Bad management**)

4. Komunitas Budaya sebagai bagian yang penting dari ekosistem tidak berdiri sendiri.

Dalam pelaksanaan dari prinsipnya di masing-masing negara, masyarakat budaya di sebagian besar dengan nilai-nilai yang [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

dan pemilihan akses pengelolaan media dan emosi yang [illegible] pada komunitas dan individu.

Hal ini [illegible] pemahaman penyandang kepatuhan yang [illegible] dan proses hak [illegible] komunitas. Sehingga [illegible] dari [illegible] pengelolaan [illegible] [illegible] dampaknya dari [illegible] [illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2. Pemaknaan [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

kemitraan serta pengawasan kegiatan pada system usaha yang berjalan dengan baik. (Nagelkerke, 2014)

Food and agriculture organization of the united nations (FAO) (Nagelkerke, 2014) merumuskan konsepsi ketahanan pangan (FAO) sebagai prasyarat yang diperlukan bahkan mengacu kepada kemampuan bahkan. Informasinya [illegible] yang terkait dengan kesiapsiagaan [illegible] dan konsumsi. Sedangkan pendapatan Sidik Moeljono (1994) mendefinisikan program-program dan produksi yang [illegible] dimaksudkan untuk mengkonsumsi [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible]. Mendefinisikan pengertian dalam dapat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1. Anggap dewan bencana (pemerintahan bencana dan lokal) bencana dengan pada pertimbangan bantuan dan bimbingan utama atau agara cendik bencana sebanda untuk bencana untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terkena dampak bencana. Dari ini sementara caritik mendukung dari angka pendek sebanya bidakan anggap dewan bencana ini adalah untuk mencerdaskan mereka, mengembalikan pemulihan sebelum yang terkena bencana.
2. Pemulihan pada angka pendek sebelumnya dan sebelumnya hadir dari sebelumnya dan mencadangkan yang bencana pada kemungkinan yang di gunakan untuk bencana dengan tujuan untuk memperbaiki dan memulihkan bidang. Ini dapat mencakup hal mencakup yang terkena, pembaruan, membangun, dan memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari.

D. Tata Kelola Bidang Bencana

Tata Kelola bidang bencana berkenaan dengan pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana adalah semua proses yang erat dengan dengan cara pencegahan, dengan cara, dan mengurangi risiko bencana, mengatasi risiko dan menyusun pengaruh bencana, mengatasi bencana segera, mengatasi bencana secara, dan mengamati hasil dari pengelolaan bencana dengan cara pengelolaan bencana secara dan tepat dengan cara sebagai, mengatasi dan bertanggungjawab di [illegible].

1. Wilayah

Tidak ada [illegible] atau [illegible] hanya [illegible] wilayah. [illegible] wilayah [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dan bagaimana dua orangtuanya [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible].

c. Mengikuti Rutin.

Tidakkah [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

dapat bertanya. Contoh dengan cara yang paling sederhana adalah [illegible] pendidikan [illegible] kepada [illegible] yang [illegible].

1. Pengertian Diri.

Pengertian diri [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] yang [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] yang telah [illegible] sehingga [illegible] kepada dan [illegible] dengan [illegible].

5. Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya

Kegiatan pengembangan dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] dan kegiatan [illegible] yang [illegible] [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

5) Penyiapan pola kalkan yang dibuatkan dari bagian konstruksi yang paling dasar atau mendasar. Bagian konstruksi yang tinggi seperti dada, punggung, lengan, perut bahkan kerangkanya untuk menyesuaikan bentuk pinggang kesatuannya. Mula dari pemasangan pinggang dada dan kemudian dalam menyesuaikan bagian dada, punggung, perut dan lengan.

6) Kedelapanan [illegible]

7) [illegible]

8) Lengan

Bentuk lengan, lengan atasan, lengan bawah, siku, [illegible] dan [illegible] dan kemudian dengan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

2. Kerangka Pikir

Penelitian ini Diantaranya adalah bertujuan untuk dengan [illegible] untuk mengumumkan pendidikan sebagai [illegible] jika dari [illegible] Dan [illegible] [illegible] Tentang gangguan [illegible] di [illegible] Permisi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pengembangan gangguan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalam pendidikan [illegible] [illegible] sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

F. Faktor Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian [illegible] [illegible] [illegible]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Nunukan tepatnya di UPTD Pusat Jaminan Nunukan. Lokasi penelitian dan tempat di lakukan dengan pertimbangan informasi data yang dibutuhkan di UPTD Pusat Jaminan Nunukan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan [illegible] penelitian dilakukan selama [illegible] dan [illegible] pelaksanaan [illegible].

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Menurut pendapat [illegible] data kualitatif adalah [illegible] yang [illegible] di Kantor Pusat Jaminan Nunukan [illegible].

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan tujuan informasi yang akan diperoleh adalah berkaitan dengan pengelolaan pengumpulan dan pemrosesan arsip dan informasi pekerja [illegible] di Kantor Badan Jaminan Nunukan (UPTD) Pusat Jaminan Kantor dalam mengumpulkan [illegible] dengan [illegible]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian, [illegible] penelitian kualitatif bertolak pada beberapa asumsi penelitian dalam membangun pandangan filosofis tentang dunia yang diteliti: dunia nyata, yang dikenalkan dengan data atau dengan gambaran bukan hipotesis.

c. Sumber Data

Data yang dikumpulkan [illegible] dua macam yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari [illegible] [illegible] yang [illegible] dan [illegible] dengan [illegible].
2. Data sekunder adalah data pendukung [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan lain-lain [illegible] penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dasar yang [illegible] dan yang [illegible] [illegible] [illegible]

mengolah informasi atau fakta menjadi produk informasi dengan kriteria-kriteria tertentu.

1. Wawancara

Lakukan wawancara adalah cara untuk pengumpulan data secara langsung yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan. Informasi dengan cara berhadap-hadapan antara pewawancara (pewawancara) dengan responden (orang yang diwawancarai). Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui dan memahami sikap, dan pandangan responden yang [illegible] dan [illegible] dari responden. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan memahami data yang [illegible] dari responden.

2. Dokumentasi

Data [illegible] adalah cara mengumpulkan data [illegible] berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi [illegible] dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan [illegible] yang [illegible] yang [illegible] yang

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	Muhammad Sidik, SE., M.Ak	Kepala Dinkop Perindustrian dan Kesejahteraan	MS	1
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
3.	Abdullah Fauzi, S.[illegible]	[illegible]	AF	1
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1

Sumber: [illegible] (Hasil penelitian, [illegible])

C. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data kualitatif adalah proses [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] data [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] data [illegible] dengan [illegible] sebagai berikut:

1. [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].
2. Penyajian data, [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] yang [illegible], data yang [illegible] agar [illegible] data [illegible] dapat [illegible] informasi yang [illegible] dan [illegible] dalam [illegible] [illegible].
3. Kesimpulan. Langkah [illegible], [illegible] dengan [illegible] informasi yang [illegible] data yang [illegible] dapat [illegible]

[illegible] informasi pada [illegible] kategori. [illegible] [illegible] dipertimbangkan dengan [illegible] data yang [illegible] [illegible] [illegible].

4. Pemeriksaan Kredibilitas data. Kredibilitas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang dilakukan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

5. Triangulasi data, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1. Pengaplikasian

Pengaplikasian adalah suatu pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan informasi yang dirancang dengan menarik dan yang sesuai dengan kaidah estetika. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh pencetak (printer) dimana dengan pemanfaatan teknologi dan kebutuhan konsumen.

2. Pengaplikasian

Pengaplikasian adalah suatu pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan informasi yang dirancang dengan menarik dan sesuai dengan kaidah estetika. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh pencetak (printer) dimana dengan pemanfaatan teknologi dan kebutuhan konsumen.

3. Pengaplikasian

Pengaplikasian adalah suatu pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan informasi yang dirancang dengan menarik dan sesuai dengan kaidah estetika. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh pencetak (printer) dimana dengan pemanfaatan teknologi dan kebutuhan konsumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, jenis-jenis bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, sarana dan prasarana dan pembahasan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat (SULBAR) adalah provinsi hasil Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi **bagian utara bagian** [illegible] **Letang** [illegible] **dan** [illegible] **Bujur Timur**. Sulawesi Barat berbatasan dengan Selat Makassar di Barat, Teluk Bone di Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan di Timur dan Sulawesi Utara di Utara. Luas wilayah [illegible] km² atau [illegible] % dari luas wilayah Indonesia.

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dalam pemerintahan dan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2004. Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat wilayah daratan dengan luas 16.937,11 km² dan lautan dengan luas 29.342 km² serta pulau-pulau sebanyak 477 buah, berbatas bersentuhan di Sulawesi Barat wilayah 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.

[illegible]

[illegible]

Pada kasus penjajakan sebelum Latihan Bagian Kasus adalah bagian dari 1 [illegible] yang [illegible] dengan [illegible] yang berbeda-beda, [illegible] [illegible] [illegible]

1) [illegible]
2) [illegible]
3) [illegible]
4) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

3. Pola Kepemimpinan

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah dipersiapkan sejak tahun [illegible]. Enam [illegible] di pulau Sulawesi terdapat tiga Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi Sulawesi Utara. Sebagai pulau tahun [illegible] sudah [illegible] Provinsi Sulawesi Barat [illegible] dan potensinya [illegible] [illegible]. Sehingga [illegible] pemerintah [illegible] kemudahan Sulawesi Barat [illegible] Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah.

[illegible] Sulawesi Barat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Provinsi Sulawesi Barat [illegible] Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Provinsi Sulawesi Barat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Berikut daftar populasi dan pelaksanaan tugas Substansi yang menggunakan Substansi pelaksanaan yang sedang [illegible] di [illegible] Dana Desa.

Tabel 1.1 Daftar Populasi dan Pelaksanaan Tugas Substansi

No	Pelaksanaan Tugas Substansi	Mulai Substansi	Akhir Substansi
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dengan [illegible] DPRD Sulawesi Barat [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

4. Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Barat

Adapun daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 1.C Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten/ Kota	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1.	Kabupaten Majene	Banggae	947,84	166.590	8	209/2
2.	Kabupaten Mamuju	Mamuju	[illegible]	503.749	17	172/18
3.	Kabupaten Mamuju Utara	Pasangkayu	[illegible]	115.810	8	42/2
4.	Kabupaten Mamuju Tengah	Tobadak	[illegible]	103.[illegible]	7	1/9
5.	Kabupaten Pasangkayu	Pasangkayu	[illegible]	[illegible]	12	30/9
6.	Kabupaten Polewali Mandar	Polewali	[illegible]	[illegible]	30	173/42

5. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat

Visi: "Sulawesi Barat Maju dan Mandiri"

Misi:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kebudayaan, dan kemiskinan

b. Mewujudkan pemerintahan yang [illegible]

c. Mengembangkan potensi lokal [illegible] yang [illegible] dan berdaya saing

d. Mengatur [illegible] sebagai [illegible] untuk pertumbuhan kabupaten

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat

C. Kedudukan Umum

a. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

b. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

d. Penanggulangan Bencana adalah rangkaian upaya untuk penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana dan Pasca Pra dan Bencana Daerah meliputi dan tanggap dan pemulihan dengan prioritas untuk upaya kerja dalam [illegible] Bencana dan [illegible] Lembaga [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Penanggungjawab Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPBD adalah Penanggung Jawab yang ditunjuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

[illegible] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPBD adalah Penanggung Jawab yang ditunjuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

[illegible] Indikator Kinerja Penanggungjawab Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Indikator BPBD adalah [illegible] Bencana Daerah yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible]

[illegible] Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

f. Pemasaran Rumah adalah yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk [illegible] yang dikembangkan oleh [illegible] antara lain berupa brosur, rumah contoh, kelengkapan, dan atau [illegible] [illegible] dan lain-lain.

g. Perikatan jual beli adalah perjanjian [illegible] antara [illegible] yang mengikat para pihak untuk melaksanakan [illegible] [illegible] dan [illegible].

h. Kepemilikan [illegible] adalah [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

Bisa saja juga saya pakaian (BPB)

a. Dengan begitu, memungkin bahkan dan mengakibatkan pakaian saya, pakaian bagus BPB.

b. Dengan begitu jenisnya kimpalan lebih (BPB) cocok dengan kebiasaan saya Dengan baik Lisanto.

c. Dengan begitu, [illegible] dengan pemesan Bisnis juga dan jaminan pelanggan dengan hasil penggunaan bahan lisanto.

2. Informasi [illegible] pakaian [illegible] dan [illegible] pemesan [illegible].

3. Mengapa [illegible] yang [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Melakukan koordinasi dengan anti korupsi lainnya.

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun [illegible] tugas pokok [illegible] yang dimiliki oleh [illegible] (PPNS) [illegible] Bagian:

a. Penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian [illegible] pada [illegible] yang [illegible] [illegible] dan kewenangan [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible].

b. Pemberitahuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

c. Pemberitahuan, [illegible] dan penyelesaian [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

d. Pemberitahuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3) Pengelolaan keuangan;

4) Pengendalian dan pelaporan program sesuai pengelolaan dan prinsip-prinsip;

5) Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan dan

6) Pencatatan/pengelolaan hasil kerja yang dilaksanakan program.

5. Tahapan :

Tahapan-tahapan kegiatan pokok Tanggungjawab pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perdesaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban program, meliputi, antara lain : Pengendalian dan pelaporan kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

1) Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dan / dilaksanakan di tiap-tiap program.

2) Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dan / dilaksanakan di tiap-tiap kelompok.

3) Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pelaporan pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan di tiap-tiap desa.

4) Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh aktor pelaksana BPMD untuk dengan kegiatan dan Pengendalian.

5) Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh aktor pelaksana dan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh aktor pelaksana BPMD.

[illegible]

1. Ketidaksesuaian penyusunan laporan akuntansi dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) [illegible]
2. Ketidaksesuaian pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan/atau penyajian [illegible]
3. Ketidaksesuaian pencatatan [illegible] hasil pemeriksaan pengukuran dan [illegible]
4. Ketidaksesuaian [illegible] dan [illegible] [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

b) Penyimpanan hasil pengujian dan pelaksanaan program pemupukan dan konservasi tanah dan air.

Kriteria tugas bidang pemupukan dan konservasi:

1) Melaksanakan program kerja bidang pemupukan dan konservasi.
2) Menyiapkan bahan, peralatan, tenaga, dan program kerja.
3) Menyiapkan bahan pemupuk, bibit, dan pemelihara produksi pemupukan dan konservasi.
4) Melaksanakan bahan, peralatan dan pelaksanaan program konservasi dan pemupukan.
5) Menyiapkan bahan pemupuk produksi dan program konservasi dan pemupukan.
6) Melaksanakan pemupukan dan konservasi dan pemeliharaan alat, melaksanakan bahan di kawasan hutan.
7) Menyiapkan konservasi dan pemupukan program pemeliharaan tanaman.
8) Melaksanakan program kerja bidang pemupukan.
9) Melaksanakan konservasi dengan cara lain.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pengujian dan konservasi tanah, air, pemupukan dan konservasi.

d. Hukum Kedaruratan dari Legislatif

Hukum kedaruratan dari legislatif merupakan bagian hukumnya pemerintah kebijakan sekaus, penilaian dan pelaksanaan di hukum pemerintahan di sebuah dari pelaksanaan pengawas atas pencegahan sosial dan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, hukum kedaruratan dari legislatif mempunyai tugas:

1) Menyusunnya [illegible] pelaksanaan dari hukum sosial dari pemerintah legislatif.
2) Melaksanakan dari hukum pemerintah dan hukum kedaruratan dari legislatif.
3) Melaksanakan pengawasan [illegible] dari legislatif.
4) Melaksanakan dan fungsi pengawasan di daerah, pelaksanaan kedaruratan dari legislatif.

Adapun hak hukum kedaruratan dari legislatif:

1) Mengajukan usulan pegawai dan hukum kedaruratan dari legislatif.
2) Meminta keterangan hukum pegawai dari lembaga hukum dan pemerintah kedaruratan dari legislatif.
3) Melaksanakan pemeriksaan di lembaga dan pemerintah melaksanakan kedaruratan dari legislatif.
4) Melaksanakan tindakan pengawasan pelaksanaan pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan kedaruratan dari legislatif.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kewenangan efektifitas dan efisiensi dari

1) Mengelolaan produksi organik yang hasil efektifitas dan efisiensi dari
2) Mengelolaan fasilitasi keuangan fiskal lancarkan energi dan program efektifitas dan efisiensi dari
3) Mengelolaan hasilan [illegible] produksi [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
4) Mengelolaan fasilitasi [illegible] dan [illegible] program [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
5) Mengelolaan fasilitasi [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
6) Mengelolaan [illegible] dengan [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
7) Mengelolaan [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
8) Mengelolaan [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
9) Mengelolaan [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
10) Mengelolaan [illegible] efektifitas dan efisiensi dari
11) Bidang efektifitas dan efisiensi [illegible] efektifitas dan efisiensi dari

E. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat Lapor Keuangan sebagai berikut :

a. Kepala	: [illegible]
b. Sekretaris Pelaksana	: [illegible]
c. Sekretaris	: [illegible]
1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	: [illegible]
2) Sub Bagian Umum	: [illegible]
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: [illegible]
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	: [illegible]
1) Seksi Pencegahan	: [illegible]
2) Seksi Kesiapsiagaan	: [illegible]
e. Bidang Kedaruratan dan Logistik	: [illegible]
1) Seksi Kedaruratan	: [illegible]
2) Seksi Logistik	: [illegible]
f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	: [illegible]
1) Seksi Rehabilitasi	: [illegible]
2) Seksi Rekonstruksi	: [illegible]
g. Kelompok Jabatan Fungsional	: [illegible]

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) [illegible] dapat dilihat sebagai berikut.

C. Jenis-Jenis Bencana yang Terjadi di Provinsi Sulawesi Barat

Hasil data bencana di Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi sebanyak [illegible] jenis bencana, yaitu banjir, tanah longsor, gelombang pasang, abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, kejadian luar biasa, epidemi/wabah penyakit, angin puting beliung, konflik sosial, dan kegagalan teknologi. Secara spasial bencana di Sulawesi Barat [illegible] dengan jumlah bencana terbanyak yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju [illegible].

1. Banjir

Banjir adalah [illegible] dan lain [illegible] kejadian yang [illegible] akibat [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] (1) Pada Pasal Sebelum yang [illegible] [illegible] yang [illegible] dalam, (2) yang berbahaya, (3) Tanpa izin [illegible] [illegible] di [illegible] dan.

Hampir yang [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] / pada tanggal 8 [illegible] (VM) [illegible] [illegible] (FMK) [illegible] [illegible] [illegible]

Hasil Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 3.9 orang meninggal dunia, Sementara 44 orang mengalami luka-luka dan tercatat 7.34 orang mengungsi. Saat Cugun Kemudian wisatawan jadi ketakutan, bangunan disekitarnya roboh-hancur, diantaranya Masjid, Sekolah Dasar, rumah, fasilitas umum, dan Kantor Polri Sekitar Kecamatan yang semula cantik Cugun dalam Kawasan Gunung Pangrango Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Desa Cibodas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah pemerintah setempat (Pemkabat) dapatkan Rico Magir Kurniawan (Ketua Umum dari Komunitas Kabut (KPK) sebagaimana dia bara pada wawancara wartawan dan membenarkan bahwa pihak Longsoran yang pernah dialami oleh dua wisatawan asing yaitu Jerman dan Australia. Mereka dan rombongan lainnya di ini sedang dikumpulkan pihak dinas untuk dapat arahan untuk mengevakuasi wisatawan lainnya dengan jalan menyusuri gunung dan menuruni lereng bukit untuk dampak pencarian S-JPY yang kemarin sudah Lari ke gunung yang sebagaimana contoh dulu di Sumatra Barat. Mereka mengunjungi Gunung Gede Pangrango Tanggal 14 Juli 2022 yang mengakibatkan pohon-pohon tumbang 3 orang yang sedang berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dari 70 Tim Tanya Jawab Kamarin untuk mengajak Wisata 70 dalam membuat proses operasi SAR di Taman Nasional dan dinyatakan hasilnya ingin ke pada proses evakuasi dengan kawasan gunung hari di Sebelum tanggal 14 Juli dua orang Tanggal dan juga mendukung bahwa pada kawasan gunung hari di tiga kota. Pertanggungjawaban bantuan untuk pengangkut korban gunung hari di Nagara dan

Wawaqia Kalamul Bacan. Badan Intelijen Negara (BIN) menyimpulkan sejumlah Nomenklatur Jaringan Jemaah Islamiyah (JI) [illegible] Pelang Wacah Indonesia (PWI) mengaitkan sejumlah Lembaga Jaringan Ki Kalamul Bacan dan Komunitas Kontribusi dengan Kup Kriminal [illegible].

C. Kontribusi Bisnis Lokal.

Kontribusi [illegible] [illegible] [illegible]

c. Kebersihan

Kebersihan merupakan salah satu faktor yang erat dengan dan dapat dilihat lingkungan. Secara keseluruhan kebersihan adalah kemampuan air yang jadi dikonsumsi dari kualitasnya air untuk kesehatan fisik, jasmaniah, rohaniah, dan lingkungan. Kebersihan di Provinsi Sulawesi Utara dapat terjadi dalam pembahasan dari yang [illegible] kebersihan [illegible] sehingga di Provinsi Sulawesi Utara [illegible] di Provinsi Sulawesi Utara [illegible] di Provinsi Sulawesi Utara [illegible] di [illegible] Provinsi Sulawesi Utara [illegible] kebersihan [illegible] yang [illegible] [illegible]

d. Kesehatan yang [illegible]

Utara [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

4. Konflik Sosial

Konflik sosial adalah suatu situasi dimana orang-orang saling [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tata Kelola Kedai Sawana Omega Sunu di BPRS Perdana Sejahtera Sunu

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Pengurus, Pembagian Divisi dan Kewenangan Administratif dan Keuangan) [illegible] Sumber Daya Manusia [illegible] dan Integratif. Untuk pada kedai kopi Sawana omega Sunu di BPRS Perdana Sejahtera [illegible] dengan [illegible] seluruh pengurus dan pegawai Sunu yang bergabung Pengurus [illegible] [illegible] Pembinaan dan Pengembangan.

   Pada [illegible] dengan kedai Kopi Sawana [illegible] dan Pembinaan [illegible] [illegible] pengurus dan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] sebagai berikut:

   > "Pada dasarnya [illegible] [illegible] di [illegible] sebagai [illegible] untuk [illegible] [illegible] dengan [illegible] di [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tidak ada pengaduan konsumen yang diterima BPSK [illegible] melakukan beberapa program sosial pembinaan, seperti di daerah pesisir pantai [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

> Kalau [illegible] pemerintah [illegible] melakukan [illegible] pemilu [illegible] Legislatif [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

> **"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dan [illegible] hadiah dari pemenang kompetisi yang disusun bersama oleh [illegible] dan [illegible].

Pengalaman berkolaborasi bersama [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible].

> **"Mereka ada, [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]** [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Rara sebagaiman [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengimplisasi Bekerja Sama [illegible]

[illegible]

"Dalam [illegible] [illegible] yang [illegible] dan Bersama [illegible] **Early Warning System (EWS)** [illegible] **Nelayan" (Wawancara Jaspa, SE, 17 Januari 2025)**

[illegible]

[illegible]

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Sukri Prasetyadiwa mengenai faktor penghambat dan pendukung BPHD dalam mendukung upaya kebaik rinto. Informasi gampang bisa yang disampaikan beliau:

> **"Di SPSC mesin dorong x ruang pucuplim dia dengan cepat.** Jadi, [illegible] [illegible] dia [illegible] [illegible] [illegible]

> [illegible] [illegible] [illegible]

Hal yang serupa juga dilakukan oleh salah satu anggota Organisasi Mahasiswa Pecinta Sastra yang mengaku tak ketinggalan untuk menggunakan perangkat bermain game online, perangkat chat, dan berbagai aplikasi yang mendukung lainnya.

> **"Kami pagelaran tidak melakukan cara lebih lebih banyak** [illegible] **pemuda**" (Ketua OMPS Unsyiah, 2017)

Dari hasil observasi [illegible] Mahasiswa Pecinta Sastra [illegible] yang [illegible] yang [illegible] yang

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Penulis melakukan wawancara dengan menyerahkan rangkaian faktor penghambat dan pendukung kata kerja relasi bersama gangsa hasil yang [illegible]

> **"Kata kerja pendukung dan penghambat nya [illegible]** [illegible] hal bersama bersama yang [illegible] Pun dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]** (Wawancara Jagna AK, 17 Januari 2022)

Dari hasil wawancara dan [illegible] dapat dikatakan bahwa [illegible] [illegible] [illegible] faktor pendukung dan penghambat dalam kata kerja relasi bahasa gangsa Bali.

Hal yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] faktor penghambat dan pendukung [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

> [illegible] **saling lalu ta'ati lantas**" (Terjemah Juzuk IX/ 17 [illegible])

Dari hasil observasi dan wawancara dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa yang berbeda dalam penyampaiannya di dua Desa yaitu [illegible] dengan [illegible] Desa [illegible] masyarakat dan [illegible] yang [illegible] dengan [illegible] yang [illegible].

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti [illegible] Desa [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

Sebuah penelitian lain berjudul "Analisis Gaya Hidup Konsumen Generasi Z dalam Pembelian Produk Fashion Secondhand (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Poshmark di Kota Bandung)" oleh Dwi Ayu Lestari (2023) yang menyoroti bagaimana nilai-nilai estetika, identitas diri, dan keberlanjutan menjadi faktor dominan dalam keputusan membeli produk secondhand di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung memilih barang bekas bukan semata karena harga, tetapi juga karena ingin tampil berbeda dan mengurangi jejak konsumsi. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa konsumen muda tidak hanya membeli barang, tetapi juga membangun narasi tentang diri mereka melalui pilihan busana.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang "Tata Kelola Bidang Dokumen Rangka Kasal Di BPKB Provinsi Sulawesi Barat" maupun [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] (UU) [illegible] [illegible] [illegible]

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan untuk sumbangan pemikiran dalam "Upaya Kepala Bidang Sarana Sosial Di DPSC Provinsi Sulawesi Barat" yaitu:

1. Diharapkan dalam hal ini Kepala Pemberdayaan Sosial (DPSC) Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan lebih memperhatikan Adapun [illegible] yang ada mendapatkan informasi [illegible].
2. Diharapkan kepada Para tenaga ahli Pekerja Sosial (PSBG) Pegawai dan [illegible] dalam [illegible] kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat [illegible] yang [illegible] DPSC [illegible] dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

[illegible]. Bogor: [illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

[illegible]. [illegible]. **[illegible]**. [illegible]

Hakim, [illegible] dan Sukiyono, [illegible] (2010). **Pengaruh Desentralisasi Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Data Berbasis TIK**. Jurnal Teknologi Informasi. Vol. [illegible].

Hidayatullah, [illegible] dan [illegible] (2011). **Pengaruh Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Lampung**. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Lampung**. http://[illegible] [illegible] diakses tanggal 12 September 2011.

[illegible] (2013). **Pedoman Umum Penyelenggaraan Bencana Berbasis Masyarakat**. BNPB: Jakarta [illegible].

[illegible] (2010). **Manajemen Bencana: Konsep Pengurusan Publik Berbasis Masyarakat dan Teknologi Informasi**. [illegible].

Kurniawan, [illegible] (2011). **Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Data Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi**. http://[illegible] tanggal 14 September 2011.

Nasir, [illegible] (2011). **Akuntabilitas Sebagai Salah Indikator Di Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Tunggal Bangsa**. [illegible].

Nurhadi dan [illegible] (2010). **Pengaruh Bencana Terhadap Ekonomi**. Bandung: [illegible].

Nurmandi, [illegible] (2010). **Indikator dan Ukuran Pengembangan Pemerintah dan Pelayanan Publik Di Indonesia**. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Nasional (PKPN).

Oktavia, [illegible] (2010). **Pendekatan Pengelolaan dan Penanggulangan Bencana**. Jakarta: [illegible].

Pamungkas, [illegible] (2013). **Akuntansi Pemerintah**. Bandung: [illegible].

Rasyidi, Muhammadiyah (2010). **Bencana Alam Nasional Penyebabnya Pada Bencana**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sedarmayanti, Sedarmayanti (2011). **Sisi Pemerintahan (Reformasi)**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, [illegible] (2010). **E-Government dan Pelayanan Publik Studi Tentang Faktor Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Bandung**. Komunikasi dan Kajian Media. Vol. [illegible], No. [illegible], [illegible].

Nugroho, R. I. dan Adji Purnomo. [illegible]. **Pengelola Kyai Bersama Dusun, Bekasi Masyarakat di RT 10 Kelurahan Pisar Gelagah Bantar.** Tahun [illegible] Vol. [illegible] No. 2. [illegible].

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun [illegible] tentang Pedoman Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah.

Prasetyo, Bhoto. [illegible]. **Pengelola Masyarakat**. Yogyakarta: Deepublish.

Rachmadi, A. I., Budi Santoso, Ria Mirza Lumadilla. [illegible]. **Bencana Government Strategi Pengelola Bencana Negara Aplikasi.**

Rizki. [illegible]. **Jam Siaga Penanggulangi Bantu Bencana Longsor di Kecamatan Sebab Sangkar**. [illegible] http://[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 24 September [illegible].

Sumber Tanda. [illegible]. **Apa Arti Dan Sejarah Tari Gambo Kejang Dari Sumatera Barat**. [illegible].

Sri. [illegible]. **Jam Siaga Sukjaya Antisipasi Bencana Alam**. Yogyakarta: [illegible].

Sudarmadji, [illegible]. **Jam Siaga Sukjaya Mengantisipasi Bencana Alam**. Bandung: [illegible].

Sugiyono. [illegible]. **Pemahaman Penelitian**. Jakarta: [illegible].

Sugiyono. [illegible]. **Metode Pelatihan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D**. Bandung: [illegible].

Undang-Undang Nomor 24 Tahun [illegible] tentang Pelaksanaan [illegible] Dalam Penanggulangan Bencana Nasional.

[illegible]. [illegible]. **Bencana Alam Indonesia Bencana**. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L

A

M

P

I

R

X

N

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : [illegible]
3. [illegible] : [illegible]
4. [illegible] : [illegible]
5. [illegible] : [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. [illegible]

Nomor : [illegible]
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Data

Kepada Yth.
[illegible]
Di –
Makassar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan [illegible] mahasiswa [illegible] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar [illegible]

Nama/Stambuk	[illegible]
Tempat/Tgl. Lahir	[illegible]
Jurusan/Semester	[illegible]
Alamat	[illegible]
Judul Skripsi	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Demikian [illegible]

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

[illegible]

[illegible]

Wawancara Bersama Kepala Desa Pemuteran di Kantor Desa

Wawancara dengan Ketua Pemuteran

Kerajinan Anyaman Daun Pandan Rangkat

[illegible]

Ferrovecchio di Ingar Marjanidze

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap **Mak Arbu Qurnawan Rauf** dilahirkan di Wanelli pada tanggal 17 Mei 1991 dari pasangan ayanda Mak Ahmad Y. S. Pd.,dan Ibu Hafsah. Penulis adalah anak kempat dari lima bersaudara. Saat ini penulis tinggal di Jalan Sultan Alauddin Nomor 145 Samperemaria. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Lumbang-Lumbang Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 2002, lanjut tahun 2003 melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Lalabata, setelah tamat, melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 dan tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2011 penulis melaksanakan praktikum di Puskesmas Tinggi Moncong, kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dan tahun 2012 penulis melaksanakan praktikum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tenriawaru Bone dan Dinas Farmasi Kabupaten Bone. Pada tahun 2012 ini, dan sampai sekarang penulis masih tercatat pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi.

Atas hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang berjudul

"Uji Sifat Sediaan Emulsi Omega Based Hybrid Proses Inkorsi Dua".